

TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA MENYONGSONG ERA GLOBALISASI DAN KEMAJUAN IPTEK ABAD 21

Oleh: H. Wuradji¹

Pendahuluan

Era globalisasi yang telah berada di depan mata kita ini, dan mau tidak mau harus kita hadapi, ditandai oleh tiga ciri utama, yaitu liberalisasi perdagangan, keterbukaan arus informasi, serta tingkat persaingan yang tinggi. Salah satu gejala yang dewasa ini sedang melanda dunia, adalah derasnya arus informasi yang berasal dari negara-negara maju yang telah menguasai dan mengendalikan informasi tersebut. Di bidang perdagangan, apabila produk-produk yang kita hasilkan rendah kualitasnya, tidak memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, pasti akan tersingkir dari pasar dunia yang tingkat persaingannya sangat tinggi. Jangankan untuk bersaing di pasar dunia, untuk bersaing di pasar dalam negeri sendiri pasti akan tersisih.

Di bidang tenaga kerja, dewasa ini persaingannya sungguh amat berat. Kita menyaksikan bahwa setiap ada lamaran menjadi pegawai negeri, berjubel masyarakat yang mendaftarkan diri, akan tetapi karena formasi sangat terbatas, hanya mereka yang memiliki keunggulan kompetitif yang dapat memasuki lapangan kerja tersebut. Tuntutan akan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional tersebut juga berlaku, bahkan tuntutannya lebih tinggi bagi dunia kerja swasta. Di dunia kerja swasta, kebutuhan akan tenaga kerja dilakukan dengan sangat ketat dan teliti. Mereka harus melalui berbagai latihan dan percobaan sebelum

*H. Wuradji adalah staf pengajar pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA*

diangkat menjadi pegawai tetap. Bahkan pegawai tetap itu diperoleh melalui sistem kontrak.

Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi komunikasi informasi sungguh tidak diduga sebelumnya. Para ahli mengatakan bahwa produk informasi yang dihasilkan 30 tahun terakhir ini jauh lebih besar dari pada yang telah dihasilkan selama 5.000 tahun sebelumnya. Seperti yang digambarkan oleh Howard Frederick, 1993 (dalam M. Alwi Dahlan, 1995) bahwa laju pertumbuhan dan akumulasi pengetahuan serta informasi, meningkat sangat cepat secara eksponensial. Sebagai perbandingan dikatakan bahwa andaikata informasi di dunia pada tahun pertama jumlahnya satu unit, maka pergandaan pertama memakan waktu 1500 tahun, yang kedua 250 tahun, tetapi selanjutnya 150 tahun menjelang abad 20. Namun sejak tahun 1950-an proses ini menanjak tajam. Masa pergandaan dua kali (*doubling*) ini menjadi hanya selama 10 tahun pada tahun 1960, 7 tahun sampai tahun 1967, kemudian 6 tahun sampai tahun 1973.

Memang kemajuan teknologi dan globalisasi informasi telah merubah arus informasi menyebar ke segala penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas antar negara/wilayah. Seperti apa yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Hubungan antar manusia dengan jarak jangkauan yang sangat jauh pun dapat dilakukan dengan sangat cepat melalui kecanggihan teknologi komunikasi seperti internet, facsimile. Di dunia per TV-an, konon bagi mereka yang memiliki peralatan parabola yang canggih dapat menikmati TV mancanegara, sehingga berita-berita aktual di negara tersebut dapat dimonitor di negeri kita. Bahkan sementara orang yang telah menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut untuk mengimpor acara yang menyiarkan adegan tak senonoh yang tidak sesuai dengan pola peradaban timur.

Di bidang teknik syuting film, dengan peralatan yang canggih dapat dilakukan trick-trick yang tidak masuk akal, seperti dalam film persilatan, orang bisa terbang tanpa sayap dan tanpa mesin, tenaga

dalam dapat ditampakkan keampuannya dengan mampu membakar pohon yang besar dan melumatkan batu dan padas yang sangat keras.

Di bidang perbankan kini telah muncul ATM (di Amerika Serikat telah memasyarakat sejak tahun 1985-an), credit card, pengambilan dan penyimpanan uang secara online.

Belum lagi perang Teluk yang sangat dahsyat itu, di mana kemenangan bagi pihak sekutu ditentukan karena mereka menguasai teknologi perang elektronik yang sangat canggih.

Dalam era globalisasi tersebut banyak tantangan akan menghadang dihadapan kita, bukan saja pada bidang ekonomi, politik, hankam, sosial-budaya, dan pendidikan. Khusus di bidang pendidikan globalisasi harus diartikan sebagai perluasan wawasan manusia yang tidak lagi berorientasi pada wawasan lokal (*localite*), akan tetapi produk pendidikan yang kita hasilkan adalah manusia berkualitas yang berkemampuan unggul dan memiliki wawasan dunia (global). Tidak mudah lembaga pendidikan yang ada dengan sistem seperti sekarang dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki wawasan global itu, apabila tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat.

Presiden Suharto menekankan perlunya diambil paling tidak tiga langkah untuk meningkatkan keunggulan bangsa Indonesia. *Pertama*, mempercepat pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, sehingga dalam kurun 10 tahun mendatang sudah selesai. Dengan selesainya program wajib belajar itu kekuatan Indonesia dalam membangun masyarakat industri dapat ditingkatkan. *Kedua*, pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi profesional agar disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada berbagai sektor pembangunan. *Ketiga*, dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan iptek perlu terus diperkuat pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan iptek mutlak diperlukan untuk mencapai keunggulan bangsa di era industrialisasi (Suara Karya, 23 Mei 1996).

Menurut Wardiman Djojonegoro, dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi, menuntut komitmen dan karya nyata lembaga pendidikan. Dikatakan bahwa "kita menyadari bahwa pendidikan akan sangat menentukan masa depan bangsa, karena semua kegiatan produktif, akan memanfaatkan keluaran dari sistem pendidikan nasional kita. Agar para tenaga terdidik tersebut dapat berkontribusi secara optimal dalam dunia kerja, maka perlu diupayakan peningkatan kualitas dan relevansi kepakaran dan keterampilan mereka dalam proses pendidikan. Proses pendidikan harus mampu menyiapkan anak didik dengan kompetensi profesional yang tinggi nilai gunanya di dunia kerja.

Sementara itu dalam rangka memenuhi kebutuhan industrialisasi dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi, maka kebutuhan akan penguasaan iptek merupakan suatu keharusan yang tak terelakkan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan masa depan bangsa.

Dalam hubungannya dengan kemampuan mengantisipasi globalisasi itu, Makagiansar (1990) mengemukakan bahwa melalui pendidikan kita harus mampu mengembangkan empat hal pada peserta didik, yaitu: (a) kemampuan mengantisipasi (*anticipate*), (b) mengerti dan mengatasi situasi (*cope*), (c) mengakomodasi (*accomodate*), dan (d) mereorientasi (*reorient*).

Menghadapi tantangan globalisasi ini, Santosa S. Hamidjojo (1990) menyampaikan lima jurus strategi dasar pendidikan, yaitu *pertama*, pendidikan untuk mengembangkan iptek, dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital, seperti manufakturing dan pertanian. Ia merupakan modal utama untuk menghadapi globalisasi. *Kedua*, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik. Ini merupakan instrumen operasional untuk berkiprah dalam globalisasi. *Ketiga*, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan. Ini merupakan penangkal

terhadap menurunnya kualitas hidup dan sistem nilai, termasuk filsafat, agama dan ideologi. Ini penting demi ketahanan sosial budaya termasuk kesatuan dan persatuan yang mungkin mengalami proses erosi karena perubahan-perubahan yang sangat cepat di segala sisi kehidupan. *Kelima*, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan, termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan nonformal. Ini termasuk usaha sentral demi penggalakan peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi sumberdaya manusia secara keseluruhan.

Kebijakan Pembangunan bidang Pendidikan dan IPTEK

Sebenarnya secara makro dasar yuridis untuk melakukan pembaharuan pendidikan di Indonesia sudah jelas baik landasan maupun arahnya. Mengenai arah pembangunan di bidang iptek disebutkan di dalam GBHN, yaitu sasaran pembangunan di bidang iptek ialah: (a) terciptanya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, ketangguhan, serta daya saing bangsa, (b) terpacunya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, serta sejahtera yang dilandasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etik didasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Diakui bahwa dalam upaya mencapai sasaran pembangunan di bidang iptek tersebut kita dihadapkan pada sejumlah kendala, yaitu: (a) masih lemahnya budaya iptek di kalangan masyarakat, (b) masih terbatasnya sumber dana bagi kegiatan penelitian, (c) masih belum memadainya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti dan tenaga teknis, (d) masih terbatasnya kualitas dan kuantitas lulusan lembaga pendidikan di bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam dan rekayasa.

Di bidang pendidikan, tujuan pendidikan nasional sudah jelas, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani rohani.

Kalau kita kupas lebih lanjut, aspek normatif dari tujuan pendidikan nasional tersebut dapat kita maknai dari lima dimensi, yaitu: (a) dimensi spiritual (keimanan, ketakwaan, budi pekerti luhur), (b) dimensi kepribadian (pribadi yang mantap dan mandiri, tangguh, etos kerja, disiplin, sehat rohani), (c) dimensi sosial (tanggung jawab kemasayarakatan dan kebangsaan), (d) dimensi intelektual (cerdas, kreatif, terampil, profesional, produktif), dan (e) dimensi fisik (sehat jasmani).

Di samping pengertian normatif dari tujuan pendidikan nasional tersebut, makna manusia berkualitas secara jelas juga dinyatakan di dalam GBHN 1993, yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Manusia Indonesia yang maju dan mandiri secara objektif diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka ketahanan nasional guna menjamin tetap terlaksananya pembangunan. Kemajuan dan kemandirian adalah hal-hal yang diperlukan bagi ketangguhan dan keuletan bangsa. Kemajuan dan kemandirian ini merupakan modal bangsa untuk tetap survive dan unggul dalam percaturan masyarakat internasional. Sehubungan dengan konsep sumber daya yang berkualitas yang dihasilkan oleh dunia pendidikan, diharapkan keluaran dari lembaga pendidikan dapat memenuhi empat kompetensi, yaitu: (a) kompetensi akademik, (b) kompetensi profesional, (c) kompetensi nilai dan sikap, dan (d) kompetensi untuk menghadapi perubahan.

Di Pendidikan Tinggi, beberapa strategi pendidikan dalam rangka penguasaan dan pengembangan iptek telah ditetapkan empat strategi pokok, yaitu: *pertama* pengembangan ilmu pengetahuan dasar untuk mendukung penguasaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan secara mendalam, serta mendorong pengembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan pengembangan teknologi

yang dapat mempercepat pembangunan. *Kedua* perlu ditingkatkan kerja sama antar lembaga yang melakukan kegiatan iptek dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan. *Ketiga* perlu dikembangkan kemitraan riset melalui kontribusi pihak swasta dan masyarakat dalam pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan iptek. *Keempat* untuk mencapai kemampuan yang setara dengan negara-negara tetangga dan negara industri, kebutuhan sarjana ilmu-ilmu IPA dan perekayasaan dengan latar belakang S1 perlu ditingkatkan. Selain itu tenaga teknik lulusan D3 dan politeknik masih dibutuhkan, karenanya perlu ditingkatkan.

Kondisi Produk Pendidikan di Indonesia Dewasa Ini

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi produk (keluaran) lembaga pendidikan di Indonesia dewasa ini, kita kutipkan klipring beberapa surat kabar sebagai berikut:

1. Haryanto S. Pangaribuan, Direktur Utama Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam suatu ceramah dan dialog bisnis di Yogyakarta menyatakan bahwa sedikitnya ada tujuh kelemahan yang dimiliki oleh sarjana lulusan S1 di negara kita dalam menghadapi dunia kerja, yaitu: (a) mereka terpacu dengan disiplin ilmunya, (b) kurang memiliki kemandirian, (c) kurang menguasai komputer, (d) lemah dalam bahasa Inggris, (e) lemah dalam hubungan interpersonal, (f) ingin cepat punya posisi yang enak, dan (g) masih diragukan pemahaman hidup berbangsa dan bernegara (Yogya Post, 9 September 1966).
2. Eriyanto, selaku Ketua Tim Peneliti Proyek "*Higher Education Development Support*" mensinyalir tentang kelemahan layanan informasi perpustakaan perguruan tinggi. Dia menyatakan, bahwa layanan informasi perpustakaan perguruan tinggi di Tanah Air dinilai lemah di era revolusi adimarga informasi dewasa ini, sehingga timbul kekhawatiran Indonesia akan "kedodoran" menghadapi persaingan

global abad 21 (Yogya Post, 15 Januari 1996).

3. Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief menilai latar belakang dan sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini kurang mendukung peningkatan produktivitas kerja. Hal tersebut disampaikan kepada wartawan seusai membuka Lokakarya ke-36 Kepala-Kepala Organisasi Produksi Asia Pasifik yang berlangsung 16-19 Januari 1996 di Hotel Sheraton Nusa Indah Bali. Dikatakannya, di Indonesia banyak anak sekolah yang tidak terlatih, sehingga banyak di antara mereka yang tidak paham terhadap etos kerja, organisasi kerja, dan etika bekerja, termasuk disiplin kerja (Yogya Post, 19 Januari 1996).
4. Kualitas pendidikan kita masih tertinggal jauh, benarkah kita masih mementingkan pemerataan sehingga kita tak usah berharap tentang mutu pendidikan kita? Seperti layaknya proses yang menghasilkan produksi, maka tiap-tiap lembaga pendidikan harus sudah menyiapkan standar mutu untuk keluarannya (Wuryadi, Yogya Post, 6 Mei 1996).
5. Publikasi ilmiah Indonesia jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hal itu dinyatakan oleh Ka. Subdit Penelitian Dirjen Dikti (Kedaulatan Rakyat, 5 Mei 1996).
6. Mensesneg Murdiono menyatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah bagaimana mengembangkan kreativitas dan prakarsa peserta didik. Dunia masa depan, kata Murdiono, adalah dunia yang sangat dinamik dan amat kompetitif yang bertumpu pada kreativitas dan prakarsa warga negara. Prakarsa dan kreativitas itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Masalah ini memerlukan renungan kita yang sungguh-sungguh, terutama dalam hubungannya dengan gejala pengangguran kaum terpelajar (Kompas, 18 Mei 1996).
7. Jika kita ingin eksis, maka kita harus siap bersaing dengan negara lain. Itulah sebabnya, kebangkitan intelektual pada abad 21 adalah

perlu. Kebangkitan intelektual berarti kita membangun sains-teknik untuk bersaing (Djohar, dalam Minggu Pagi, 19 Mei 1996).

8. Selama ini, kemampuan lulusan SLTA, termasuk SLTA Kejuruan belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Data menunjukkan, tenaga kerja berpendidikan SLTA ke atas yang menganggur berjumlah 2,23 juta orang. Banyaknya sekolah kejuruan yang tidak memiliki fasilitas praktik menyebabkan keterampilan lulusannya tertinggal dari tuntutan kebutuhan di lapangan. Sekolah kejuruan harus bisa menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor manufaktur, perdagangan eceran, dan jasa (Djemari mardapi, Bernas, 22 Mei 1996).
9. Kalah dalam persaingan, pengangguran intelektual merebak (KR, 20 November 1996). Isu merebaknya pengangguran intelektual disebabkan oleh kekalahan dalam persaingan terutama dalam kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh setelah lulus sarjana belum memberikan jaminan dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Penerapannya harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan di luar bangku kuliah yang terus berkembang dengan cepat. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Kabinet RI Bambang Kesowo di UGM Yogyakarta.

Permasalahan-permasalahan dalam hubungannya dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan sebagaimana digambarkan di atas hanya merupakan sebagian kecil dari pendapat tokoh-tokoh masyarakat yang dilansir oleh media massa akhir-akhir ini. Namun paling tidak semuanya itu telah meyakinkan kita akan kondisi lulusan lembaga pendidikan kita baik lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi. Apakah dengan kondisi lulusan seperti itu, mereka memiliki kemampuan bersaing. Jika untuk bersaing dengan sesamanya di dalam negeri sangat sulit, bagaimana bila bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan dari luar negeri.

Apa Yang Telah Diperbuat Dunia Pendidikan di Indonesia Menyongsong Abad 21

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengantisipasi tuntutan era globalisasi telah melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan. Beberapa contoh pembaharuan itu antara lain:

1. Di sekolah dasar sejak tahun 1985 telah dirintis peningkatan proses belajar mengajar melalui suatu inovasi yang disebut cara belajar siswa aktif (CBSA), yang uji cobanya dilakukan di kabupaten Cianjur Jawa Barat, kemudian setelah dilakukan evaluasi, dideseminasikan ke seluruh Indonesia.
2. Tahun 1990 pemerintah telah menyelenggarakan Program D II PGSD yang akan menghasilkan guru-guru SD yang berkualifikasi D II. Dengan telah dihasilkannya program DII PGSD tersebut, nantinya semua guru SD tidak boleh lagi diangkat dari tamatan SPG. Kemudian pada tahun 1993/1994 di sekolah dasar dilakukan peningkatan kualifikasi profesional guru-guru SD melalui apa yang dinamakan proyek PEQIP (*Primary Education Qualification Improvement Project*). Di samping itu para guru SD yang masih berkualifikasi pendidikan SPG dimotivasi untuk melanjutkan studinya melalui program penyetaraan DII PGSD. Pembaharuan di bidang pendidikan dasar dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan dasar. Lulusan pendidikan dasar yang berkualitas merupakan modal yang kuat untuk memasuki jenjang pendidikan di sekolah lanjutan.
3. Di jenjang pendidikan menengah, kini telah muncul sekolah-sekolah unggulan, sebagai upaya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan antisipatif menghadapi era globalisasi. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh beberapa yayasan tersebut dapat dianggap

sebagai inovasi untuk merintis lulusan yang dapat bersaing di era globalisasi. Sementara itu kurikulum SMU dan Sekolah Kejuruan telah dilakukan pengembangan menuju kurikulum yang antisipatif baik dalam memasuki dunia kerja maupun dalam memasuki Perguruan Tinggi. Dewasa ini pemerintah tengah mempersiapkan peningkatan kualifikasi tenaga pengajar LPTK melalui proyek PGSM untuk melanjutkan studi ke S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Di jenjang pendidikan tinggi mulai tahun 1995 telah diberlakukan kurikulum nasional, yang diperkirakan akan mampu membekali lulusan perguruan tinggi memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif menyongsong abad 21. Di samping itu dalam rangka memenuhi kebutuhan lapangan akan tenaga iptek, Dirjen Dikti selama tiga tahun terakhir ini dalam proses penerimaan calon mahasiswa PT lewat UMPTN telah mengeluarkan kebijaksanaan bahwa daya tampung untuk kelompok ilmu sosial tidak akan ditambah, sementara tambahan daya tampung disediakan untuk kelompok IPA dan Teknologi.

Pemikiran tentang Perlunya Inovasi Pendidikan,

Memang upaya pembaharuan telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang menjadi pertanyaan ialah sudahkah rintisan-rintisan ke arah pembaharuan pendidikan di Indonesia itu telah cukup memadai untuk memperbaiki/meningkatkan mutu keluaran dari lembaga pendidikan kita. Jawabannya tentu kita sudah bisa menebak, yaitu "belum". Mengapa? Karena semua yang telah dilakukan itu baru merupakan rintisan. Dari hasil rintisan itu, kita dapat memprediksi dalam jangka waktu berapa tahun lagi lembaga pendidikan kita akan dapat memproduksi lulusan unggul yang dapat bersaing di era globalisasi?

Sehubungan dengan permasalahan itu, pembaharuan pendidikan seyogyanya dilakukan secara serentak di semua jenis dan jenjang pendidikan. Kalau kita perhatikan rintisan ke arah inovasi sebagaimana

digambarkan di atas, PEQIP misalnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi profesional guru Sekolah Dasar, dewasa ini hanya dilakukan di beberapa SD yang ditunjuk sebagai sampel. Walaupun dari laporan Bank Dunia hasilnya dianggap cukup menggembirakan, akan tetapi PEQIP itu didanai dari proyek. Apakah hasil yang sudah baik itu dapat dideseminasikan kepada SD reguler yang tidak mendapat dana dari proyek? Proyek sekolah unggul yang telah dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Umum (Magelang, Jakarta, Sumatera Utara, dll), saat ini penyelenggaraannya memang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Para siswa diwajibkan tinggal di asrama, sarana pembelajaran disiapkan lengkap, laboratorium disiapkan secara matang dan memenuhi syarat, siswa-siswa diseleksi secara ketat, demikian juga guru-gurunya terpilih, mereka juga mendapatkan kesejahteraan yang memadai, jauh di atas penghasilan guru-guru di sekolah negeri yang biasa. Apakah SMU-SMU lain dapat memiliki sarana dan prasarana seperti SMU unggul itu?

Untuk menghasilkan lulusan unggul yang dapat mengantisipasi era globalisasi diperlukan pembaharuan atau inovasi pendidikan. Berikut adalah beberapa pemikiran mengenai pembaharuan pendidikan itu:

1. Kalau kita betul-betul menginginkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, maka kebijaksanaan tentang pemerataan pendidikan harus mulai ditinjau kembali dengan mempercepat proses penyelesaiannya. Dalam rangka pemerataan pendidikan bangsa kita telah menetapkan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun itu harus dapat dipercepat pelaksanaannya, sehingga kita dapat memasuki program wajib belajar yang kedua, yaitu Wajib Belajar Duabelas Tahun.
2. Orientasi pengembangan pendidikan di Indonesia selanjutnya harus lebih memprioritaskan pada aspek mutu. Untuk keperluan itu kiranya sudah pada saatnya untuk mempertimbangkan tentang kendali mutu bagi keluaran lembaga pendidikan di Indonesia dengan standar negara maju.

3. Perlu didukung kebijakan untuk memberi prioritas pengembangan kelompok Iptek melebihi pengembangan bidang IPS, tetapi harus tetap diingat tidak boleh mengabaikan aspek humaniora. Banyak pengalaman di negara-negara maju yang terlalu menonjolkan bidang iptek, sebagai akibatnya mengarah ke sekularisme dan materialisme. Perlu diingatkan di sini, lima dimensi normatif dari tujuan pendidikan nasional kita harus dapat diinternalisasi oleh peserta didik secara utuh.
4. Untuk mengantisipasi era globalisasi di abad 21, lulusan pendidikan menengah ke atas harus menguasai bahasa komunikasi global yaitu bahasa Inggris. Sehubungan dengan itu proses pembelajaran bahasa Inggris harus lebih diefektifkan, kalau perlu diubah kurikulum maupun sistem pembelajarannya.
5. Pembaharuan pendidikan dewasa ini harus dilakukan pada tingkat mikro, pada aspek hubungan guru dengan siswa di kelas, dengan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas, pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang berpotensi unggul untuk mengoptimalkan usaha belajar dengan kesempatan memperoleh pengalaman belajar (*learning experience*) melalui cara belajar yang dapat mengembangkan kreativitas.
6. Bersamaan dengan itu setiap upaya pembaharuan pendidikan harus dibarengi dengan tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Tetapi jangan lupa untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar yang baik, diperlukan guru yang profesional. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan guru? Sudahkah memadai? Mereka mengemban misi dan memikul tanggung jawab yang besar dalam menyiapkan generasi muda agar memiliki kemampuan dan keunggulan yang diperlukan untuk menjawab tantangan global di abad 21 ini.
7. Masalah lain yang perlu mendapatkan penanganan segera agar kita bisa memasuki era globalisasi dengan mulus, adalah soal disiplin dan etos kerja. Kondisi mengenai disiplin dan etos kerja memang masih sangat memprihatinkan. Justru akhir-akhir ini disinyalir lulusan pendidikan kita mengalami penurunan dalam hal disiplin dan etos

kerja. Disiplin dan etos kerja memang merupakan masalah yang pelik, karena mempunyai mata rantai yang erat dengan lingkungan sosial budaya masyarakat. Menurut pendapat saya, titik berat penangannya jangan terlalu dibebankan kepada pendidikan formal. Sebaliknya keluarga dan masyarakat harus mendapat porsi yang lebih besar, karena kedua lembaga pendidikan itu yang semestinya berperan. Pengalaman menunjukkan bahwa dari kehidupan keluarga yang disiplin dapat menghasilkan anak yang disiplin. Demikian juga halnya dengan etos kerja, akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kepustakaan

- Alwi Dahlan M. (1996). *Tantangan Perguruan Tinggi Era Keterbukaan Globalisasi Informasi dan Sosial Budaya*. Jakarta: BP 7 Pusat.
- IKIP YOGYAKARTA. *Kliping Surat Kabar Tahun 1996*.
- Makagiansar M. (1990). Dimensi dan Tantangan Pendidikan dalam Era Globalisasi. *Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun IX, Desember 1990*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Santoso S. Hamidjojo (1990). Lima Jurus Strategi Dasar Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi. *Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun IX, Desember 1990*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tangyong, dkk. (1990). *Sistem Pembinaan Profesional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang.
- Wardiman Djojonegoro, (1996). *Pengembangan Perguruan Tinggi dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: BP 7 Pusat.